

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu-isu yang berkaitan dengan aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan masih kerap diabaikan, meskipun tantangan sosial yang signifikan dan kerusakan lingkungan semakin meningkat. Sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan akan perhatian yang lebih serius terhadap permasalahan ini, terciptanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan agenda pembangunan global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 untuk menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan hingga tahun 2030 (Ayuningtyas & Rositawati, 2025). SDGs mencakup 17 tujuan utama dan 169 target yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan global yang kompleks, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, perubahan iklim, serta perlunya menjaga keberlanjutan pembangunan (Haya Zen et al., 2025). Pembangunan berkelanjutan ini diasumsikan akan menjadi usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di lingkup sosial maupun ekonomi (Safitri et al., 2024).

Program SDGs ini berlaku bagi semua negara (universal) tanpa kecuali, baik negara yang sudah maju maupun negara yang sedang berkembang sama-sama memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs (Nasrullah, 2022). Tanpa Kelaparan atau *Zero Hunger* merupakan tujuan kedua SDGs, yang menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data dari Global Hunger

Index (GHI) 2024, tingkat kelaparan Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 127 negara dengan skor 16,9 dan menjadi posisi terburuk kedua di ASEAN dengan kategori tingkat kelaparan sedang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tanpa Kelaparan berfokus pada mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. Sedangkan menurut *United Nations* atau PBB, untuk mencapai Tujuan 2 memerlukan tindakan untuk memperkuat sistem pangan, mendukung produsen skala kecil, meningkatkan layanan, memastikan akses ke pola makan bergizi, dan mengatasi faktor struktural yang menyebabkan fluktuasi harga pangan melalui pembiayaan terkoordinasi dan strategi multisektor.

Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan kelaparan sebagai kondisi fisik yang tidak nyaman atau menyakitkan akibat dari kurangnya asupan energi yang berasal dari makanan. Kondisi ini dapat menjadi kronis ketika individu tidak secara konsisten mendapatkan jumlah kalori yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang normal, aktif, dan sehat. Dalam hal ini, FAO menggunakan indikator *Prevalence of Undernourishment (PoU)* atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Di samping itu, FAO juga menjelaskan bahwa seseorang dianggap berada dalam risiko kerawanan pangan apabila mereka tidak memiliki akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap makanan yang cukup aman serta bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal, serta untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat.

Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah yang berlandaskan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) belum dapat dikelola dengan baik. Implementasi SDGs, khususnya tujuan Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), masih menghadapi berbagai kendala di setiap daerahnya. Sejalan dengan Tujuan kedua SDGs, salah satu indikator penting yang menunjukkan ketahanan pangan di Indonesia adalah Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan. Menurut BPS, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka PoU didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap tahunnya dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), penghitungan indikator PoU didasarkan pada perbandingan jumlah kalori yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat menjalani hidup yang sehat, aktif, dan produktif, dengan kebutuhan minimum kalori yang mencapai 2.100 kkal untuk setiap individu per hari. Kebutuhan energi minimum atau *Minimum Dietary Energi Requirement* (MDER) dihitung dengan memperhatikan faktor seperti jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, serta tingkat aktivitas fisik. Kondisi ini menuntut strategi ketahanan pangan yang lebih adaptif dan berbasis wilayah guna menjamin akses pangan yang merata dan berkelanjutan (Syakirah et al., 2025). Sehingga apabila konsumsi kalori rata-rata

individu berada dibawah batas minimum dalam jangka waktu tertentu, maka individu tersebut dapat dikatakan mengalami kekurangan konsumsi pangan.

Berdasarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) dikategorikan menjadi lima tingkatan: sangat rendah <2,5%, rendah 2,5-4%, sedang 5-19%, tinggi 20-34%, dan sangat tinggi > 35%. Klasifikasi ini menunjukkan status ketahanan pangan di suatu daerah, dimana jika nilai PoU yang semakin rendah menunjukkan ketahanan pangan yang lebih baik. Penghitungan angka PoU dapat dinyatakan sebagai proporsi penduduk dengan konsumsi energi (x) yang lebih kecil dari MDER, yaitu: $PoU = (\text{Jumlah Penduduk dengan Konsumsi Kalori} < \text{MDER} / \text{Total Penduduk}) \times 100\%$. Menurut data yang diperoleh dari BPS, berikut merupakan beberapa provinsi dengan klasifikasi tingkat PoU yang berbeda di Indonesia pada tahun 2024.

Tabel 1.1 Klasifikasi Nilai PoU 2024

Sangat Rendah (<2,5%)	Rendah (2,5-4%)	Sedang (5-19%)	Tinggi (20-34%)	Sangat Tinggi (>35%)
-	DKI Jakarta 3,53%	Aceh 9,10%	Maluku 31,66%	Papua Tengah 37,69%
	Banten 2,55%	Sumatera Utara 7,54%	Maluku Utara 28,44%	
	Bali 3,20%	Sumatera Barat 8,88%	Papua Barat 21,91%	
	NTB 2,74%	Riau 10,93%	Papua Barat Daya 20,53%	
	Kalimantan Selatan 3,83%	Jambi 10,58%	Papua 26,03%	
		Sumatera Selatan 5,97%	Papua Selatan 29,26%	

		Bengkulu 9,86%	Papua Pegunungan 27,26%	
		Lampung 10,68%		
		Kep. Bangka Belitung 10,66%		
		Kep. Riau 9,55%		
		Jawa Barat 5,99%		
		Jawa Tengah 8,63%		
		DI Yogyakarta 9,05%		
		Jawa Timur 8,40%		
		NTT 12,49%		
		Kalimantan Barat 13,56%		
		Kalimantan Tengah 8,50%		
		Kalimantan Timur 7,40%		
		Kalimantan Utara 14,61%		
		Sulawesi Utara 6,16%		
		Sulawesi Tengah 10,51%		
		Sulawesi Selatan 6,99%		
		Sulawesi Tenggara 10,25%		
		Gorontalo 15,99%		
		Sulawesi Barat 6,53%		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

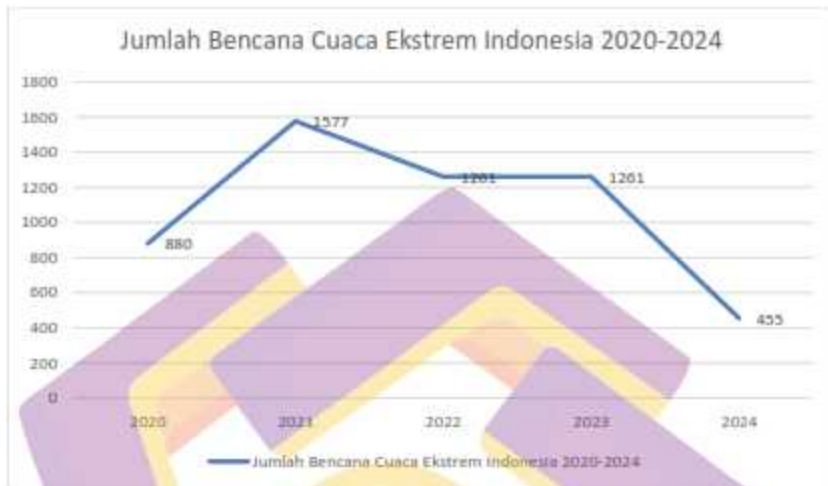
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tidak ada daerah yang termasuk ke dalam kategori PoU sangat rendah <2,5%, yang seharusnya menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang sangat baik. Kondisi ini mencerminkan adanya masalah yang bersifat struktural dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia terutama di wilayah timur. Sejumlah 25 provinsi di Indonesia dikategorikan dengan tingkat PoU sedang sebesar 5-19% yang menunjukkan bahwa ketidakcukupan pangan yang signifikan tidak hanya terjadi di wilayah rentan tetapi telah berkembang menjadi masalah yang cukup luas. Terlebih lagi, Papua Tengah memiliki nilai PoU sebesar 37,69% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki akses pangan yang tidak memadai. Klasifikasi pada provinsi di Indonesia mengindikasikan bahwa sejumlah penduduk masih menghadapi masalah ketidakcukupan konsumsi pangan, di mana akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi belum sepenuhnya terjamin secara berkelanjutan.

Tingginya angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU) di beberapa wilayah menunjukkan bahwa kekurangan pangan masih menjadi masalah yang cukup signifikan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh dalam peningkatan ketidakcukupan pangan adalah bencana alam, terutama fenomena cuaca ekstrem. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua yang menyebabkan wilayah ini memiliki sistem sirkulasi udara yang kompleks (Sinaga et al., 2026). Dampak perubahan iklim dirasakan di berbagai bidang, termasuk pertanian, kesehatan, dan ekonomi, akibat

meningkatnya suhu global, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi bencana alam (Febriosa et al., 2025).

Sejalan dengan kondisi tersebut, fenomena cuaca ekstrem juga berkaitan dengan SDGs 13: *Climate Action*, yang menekankan urgensi dalam menangani perubahan iklim dan efek yang ditimbulkannya. Terjadinya perubahan iklim berdampak positif terhadap inkonsistensi keseimbangan alam yang secara tidak langsung akan memperburuk kerusakan alam (Idrus & Usi, 2024). Ketidakmampuan sistem pangan dalam menyesuaikan dengan perubahan iklim dapat memperburuk ketahanan pangan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya ketidakcukupan konsumsi pangan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mencapai SDGs 13 melalui kebijakan iklim yang efisien sangat penting, tidak hanya untuk mengurangi pengaruh dari cuaca ekstrem, tetapi juga untuk membantu mewujudkan SDGs 2 (*Zero Hunger*) secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama lima tahun terakhir, fenomena cuaca ekstrem di Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dan memberikan dampak yang signifikan pada ketidakcukupan konsumsi pangan. Hal ini digambarkan dengan perubahan jumlah peristiwa cuaca ekstrem di Indonesia selama periode 2020-2024, yang mengalami fluktuasi dengan lonjakan signifikan dari 880 peristiwa pada 2020 menjadi 1.577 peristiwa di 2021, penurunan menjadi 1.261 pada tahun 2022 dan 2023, sebelum akhirnya menurun drastis menjadi 455 peristiwa pada 2024. Hasil tersebut ditunjukkan dengan grafik berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Gambar 1.1 Jumlah Bencana Cuaca Ekstrem

Selain bencana alam cuaca ekstrem, kesulitan dalam menjangkau infrastruktur pertanian juga dapat mempengaruhi prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Azmi, 2025), menegaskan bahwa infrastruktur dasar, khususnya irigasi dan aksesibilitas wilayah, merupakan faktor strategis dalam meningkatkan efisiensi produksi pertanian di tingkat usaha tani. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Tukan et al., 2025), menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan kondisi sosial ekonomi secara berkesinambungan tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan terhadap masyarakat secara nasional.

Beberapa contoh infrastruktur pertanian seperti transportasi pertanian, jalan pertanian, dan sistem irigasi merupakan elemen penting untuk dapat menunjang hasil pertanian yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat sehingga dapat mengurangi angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Tersedianya jalan tani dapat membantu meningkatkan distribusi hasil pertanian dan pendapatan petani dengan memperluas jangkauan transportasi (Indriani et al., 2025). Di sisi lain, aksesibilitas dibentuk dengan struktur, kapasitas, dan konektivitas dari infrastruktur transportasi yang tidak seragam (Ramandei, 2024). Sedangkan pengertian irigasi menurut (Malika Wildan Pratama et al., 2026), irigasi merupakan suatu usaha pengelolaan air yang mencakup penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air guna mendukung kegiatan pertanian secara optimal.

Berdasarkan hasil survei ekonomi pertanian yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa daerah di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses infrastruktur pertanian di tahun 2024. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan Provinsi Bali yang memiliki persentase tertinggi sebesar 79,06%, kemudian tertinggi kedua adalah Sulawesi Tengah sebesar 65,58%, dan Gorontalo sebesar 44,93% yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesulitan akses terhadap infrastruktur pertanian seperti jalan, transportasi pertanian, dan sistem irigasi di berbagai wilayah pada tahun 2024. Berikut merupakan gambar yang menjelaskan perbedaan tingkat kesulitan infrastruktur pertanian dengan 3 provinsi tertinggi.



Sumber: Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1.2 Akses Infrastruktur Pertanian Sulit

Di samping permasalahan bencana alam cuaca ekstrem dan keterbatasan akses infrastruktur pertanian yang sulit, persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan menjadi faktor penting lainnya yang berpengaruh pada tingginya nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Sejalan dengan Tujuan 1 SDGs, yaitu *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan), yang memiliki tujuan untuk menghentikan semua bentuk kemiskinan secara global. Menurut (Danilia & Setianingsih, 2024), Tujuan SDGs yang terkait kemiskinan antara lain bertujuan mengakhiri kemiskinan ekstrem bagi semua orang di manapun mereka berada. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur dasar (Saputri et al., 2025).

Penduduk yang hidup dalam kemiskinan mempunyai hubungan yang cukup erat dengan tingkat kesejahteraan serta kemampuan untuk mendapatkan makanan yang cukup. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (Mansur, 2024). Penelitian lain yang dilakukan oleh (Purwoko & Setiawan, 2023) mengatakan bahwa kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan layak, serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Beberapa kondisi tersebut akan menghambat peluang masyarakat rentan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan sehingga akan berpengaruh pada daya beli terutama pada konsumsi pangan.

Peningkatan dan penurunan persentase penduduk miskin tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perubahan signifikan dalam tingkat kemiskinan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi dan sosial. Pemulihan ekonomi Indonesia terlihat dari pertumbuhan PDB yang positif setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 (Roreng et al., 2025). Namun, tahun-tahun berikutnya, angka kemiskinan menunjukkan pengurangan yang sejalan dengan pulihnya ekonomi serta adanya peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2024

Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin

Meski demikian, kondisi fluktuatif tersebut menandakan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah mendasar dan memerlukan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan angka ketidakcukupan konsumsi pangan. Penelitian ini dilakukan dan didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Yahya et al., 2023) menunjukkan bahwa produksi rata-rata padi dan kepadatan penduduk berpengaruh menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, sedangkan

persentase penduduk miskin, umur harapan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan rumah tangga tanpa akses air bersih berpengaruh meningkatkan prevalensi serta dipengaruhi oleh situasi di provinsi di sekitarnya. Sedangkan penelitian oleh (Baihaqi, 2025) menyebutkan produksi beras secara negatif signifikan menurunkan prevalensi ketidakcukupan pangan di wilayah Indonesia Timur, sementara indeks kemahalan infrastruktur tidak memberikan pengaruh signifikan. Namun, diversifikasi pangan secara positif berpengaruh besar terhadap peningkatan prevalensi ketidakcukupan pangan di wilayah tersebut.

Penelitian ini menegaskan bahwa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak dimensi yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh fenomena cuaca ekstrem, akses infrastruktur pertanian yang sulit, dan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebagai ukuran ketahanan pangan. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang menentukan ketidakcukupan pangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan yang lebih responsif dan membantu untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah ketidakcukupan konsumsi pangan saat ini telah menjadi permasalahan nasional hingga internasional. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang mengalami berbagai dampak yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dari faktor pangan masyarakat. Ketidakcukupan konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bencana alam cuaca ekstrem, akses infrastruktur pertanian sulit, dan persentase penduduk miskin. Variabel tersebut dapat mendukung penelitian ini untuk mengetahui interaksi setiap variabel terhadap capaian indikator SDGs yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berikut merupakan beberapa rumusan masalah untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi:

1. Bagaimana pengaruh bencana alam cuaca ekstrem terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan?
2. Bagaimana pengaruh akses infrastruktur pertanian sulit terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan?
3. Bagaimana pengaruh persentase penduduk miskin terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk dapat mengetahui dan menganalisis pengaruh bencana alam cuaca ekstrem, akses infrastruktur pertanian sulit,

dan persentase penduduk miskin terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh bencana alam cuaca ekstrem terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
2. Menganalisis pengaruh akses infrastruktur pertanian sulit terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
3. Menganalisis pengaruh persentase penduduk miskin terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi beberapa pihak seperti:

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan landasan bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan, terutama dalam menghadapi dampak bencana, meningkatkan akses terhadap infrastruktur, dan menurunkan tingkat kemiskinan untuk meningkatkan pasokan pangan.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, terutama pengaruh bencana alam, kurangnya akses infrastruktur pertanian, dan

kemiskinan. Sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketersediaan pangan dan mendukung upaya ketahanan pangan yang berkelanjutan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan wawasan penulis mengenai permasalahan ketahanan pangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi media bagi penulis untuk mengembangkan keterampilan analisis dan penerapan teori dalam penelitian ilmiah, yang diharapkan bisa menjadi landasan akademis dan profesional di kemudian hari.

1.5. Sistematika Bab

Adapun dalam penulisan skripsi terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang dari penelitian yang menjelaskan alasan pemilihan topik, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, membahas hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis yang menjadi acuan dalam melakukan analisis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan pendekatan serta desain penelitian, variabel-variabel yang digunakan, sumber dan teknik untuk mengumpulkan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil dari pengolahan serta analisis data yang sistematis, disertai dengan pembahasan yang mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan kondisi empiris yang digunakan.

5. PENUTUP

Kesimpulan menyajikan ringkasan dari hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dan sebagai referensi untuk penelitian di masa mendatang.